

## KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DEMOKRASI AMERIKA SERIKAT VERSUS KOMUNIKASI ANTAR BUDAYA DEMOKRASI INDONESIA

Asni Dewi S. Bishry

Dosen Ilmu komunikasi UNIDHA

### A. Pendahuluan

Demokrasi yang dipakai oleh Amerika Serikat merupakan akar dari demokrasi ala ALEXIS DE TOQUEVILLE yaitu , demokrasi yang akan mampu dalam menghidupkan kembali kepercayaan masyarakat, melestarikan adat istiadat , mengatur gerakan masyarakat , memperbaiki pengalaman dan pengetahuan dalam beradaptasi demokrasi secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai pemerintah “ dari rakyat , oleh rakyat, untuk rakyat”. bahwa kekuasaan politik di tangn rakyat sebagian besarnya, sebagaimana dikemukakan oleh abraham lincoln. Konsep demokrasi yang berdasarkan pada prinsip “pemerintah oleh rakyat “ berarti pada dasarnya orang mengatur dirinya sendiri, bahwa berpartisipasi dalam membuat keputusan penting bahwa struktur hidup mereka dan penentuan nasib masyarakat.

Menurut para ahli, demokrasi memiliki beberapa arti, seperti yang dikatakan oleh (1) Joseph A. Schmeter, bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu - individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat . (2) Sidney Hook, berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan - keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. (3) Philippe C. Schemitter dan terry lynn karl, menyatakan demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan mereka di wilayah public oleh warga negaranya . yang bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang terpilih. (4) Henry B. Mayo, berpendapat bahwa demokrasi sebagai sistem politik yang merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil -wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan - pemilihan yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana dimana terjadinya kebebasan

Dengan adanya sejarah pemikiran - pemikiran politik tentang demokrasi sering kali skeptis , tidak berarti pemerintah tidak dapat mengendalikan masa yang seringkali melakukan demonstrasi. Hal ini dapat dengan mudah pemerintah yang demokrasi berubah jadi tirani. Bahkan adanya pemikiran -pemikiran para ahli pada demokrasi amerika yang berasal adari ALEXIS DE TOCQUEVILLE, khawatir tentang adanya tirani mayoritas yang meratakan demokrasi kearah yang keinginnya. Pendapat bahwa demokrasi tidak dapat sesuai dengan keinginannya merupakan pendapat yang tidak benar. Demokrasi dapat

sesuai dengan setiap negara bahkan untuk negara soviet yang totalitarianisme pun demokrasi berkembang.

Bagi beberapa demokrasi bera bagi yang lain, berarti pemilihan umum yang bebas demokrasi adalah kapitalis, pasar bebas, bahkan ada yang menyatakan demokrasi berarti kebebasan untuk melakukan apa yang di inginkan tanpa campur tangan pemerintah. Dapat tertangkap dalam revolusi Amerika Serikat, bahwa demokrasi merupakan salah satu implimentasi nilai kebebasan yang telah ada pada diri seorang manusia semenjak manusia itu dilahirkan.

## **B. Penerapan Demokrasi Amerika Serikat**

Negara Amerika Serikat percaya pada demokrasi yang sesuai dengan kebijakan yang dapat menguntungkan pemerintah dan aturan - aturan yang ada, seperti yang terdapat pada demokrasi langsung dan demokrasi representatif.

### **1. Direct ( langsung)**

Dalam demokrasi langsung , hukum dan keputusan yang dibuat adalah oleh rakyat tanpa melalui rumah atau senat. Jenis demokrasi mungkin tidak akan pernah ada Di Amerika Serikat. Sebuah contoh yang sempurna adalah ketika ada nya balai kota di setiap kota, dimana balai koata tersebut adalah tempat dalam melaksanakan permusyawarahan dalam memutuskan kebijakan - kebijakan politik terhadap kota tersebut. Hal ini merupakan demokrasi murni.

Bentuk langsung dari demokrasi di Amerika adalah dalam pemungutan suara untuk presiden dan wakil presiden, Rakyat dan pemerintah menghadapi tantangan besar sebagai perkembangan demokrasi pada abad ke-21 saat ini. Perdebaan karakter dan intensitas negara yang berbeda,pemerintah harus dapat menghadapi tekanan globalisasi ( ekonomi, lingkungan , kesehatan dan keamanan) dengan kebijakan - kebijakan dan program- program yang bisa meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat dapat bekerjasama.

Partisipasi ini dapat mengambil beberapa bentuk, namun salam kasus demokrasi langsung partisipasi rakyat keterlibatan langsung dan secara terus menerus dalam pengambilan keputusan, melalui perangkat seperti referendu, pertemuan masal, televisi, bahkan internatif. Alternatif dan bentuk yang lebih umum dari partisipasi demokrasi adalah tindakan pemungutan suara yang biasa disebut dengan demokrasi perwakilan. Ketika warga memilih dan membuat keputusan dalam memilih kandidat yang dapat mengatur hidup mereka dan yang akan membuat keputusan atas nama masyarakat. Bagaimanapun pemilu memberikan kompetitif pemberdayaan masyarakat dan politisi yang dapat diandalkan. Sisi lain dari model demokrasi yang dibangun atas prinsip “demokrasi untuk rakyat “ yang memungkinkan ruang untuk partisipasi publik untuk membentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung, contohnya seperti demokrasi totaliter yang dikembangkan oleh hitler dan mussolini.

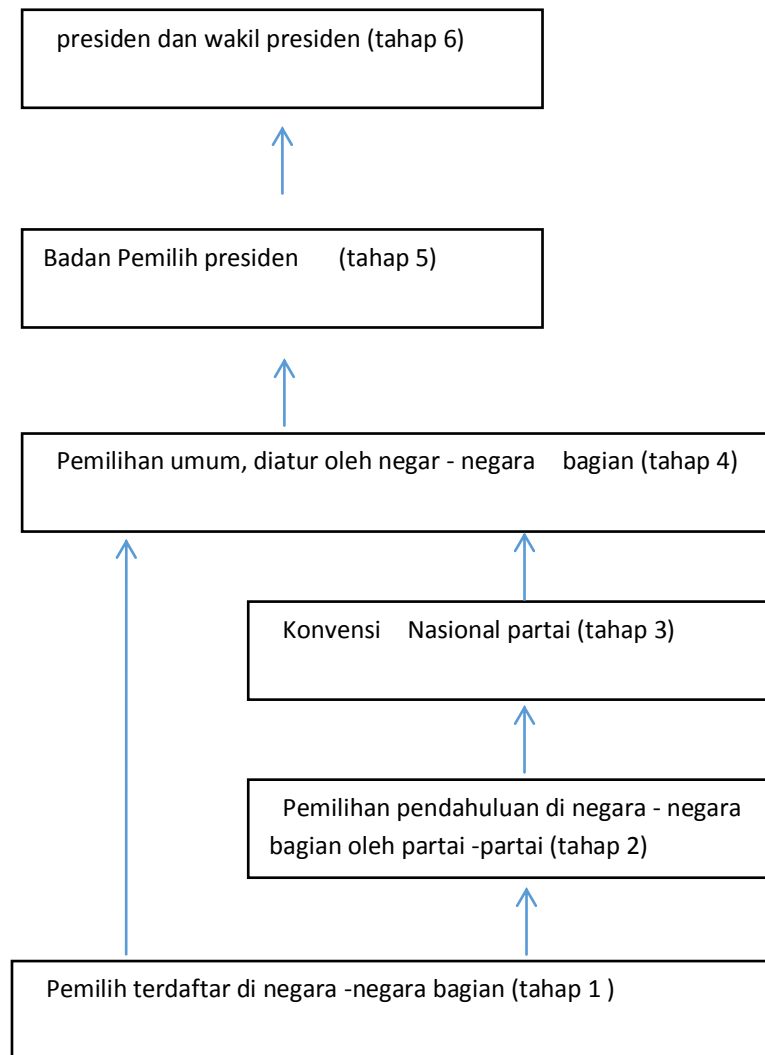
Demokrasi langsung didasarkan pada partisipasi langsung tanpa perantara dan terus menerus dari warga dalam tugas-tugas pemerintahan. Demokrasi langsung ini menyimpulkan perbedaan antara pemerintah dan dengan yang di perintah antar negara dan masyarakat sipil. Sistem pemerintahan ini sendiri dipopulerkan di Athena kuno melalui bentuk pemerintahan masa manifestasi modern dalam penggunaan referendum. Manfaat demokrasi langsung: (1) Tingginya kontrol masyarakat pada pemerintah untuk mejadikan pemerintah yang demokrasi. (2) Menciptakan warga negara yang baik dan peka terhadap politik serta informasi-informasi atau pun pendidikan yang dibawa oleh politik itu sendiri. (3) Memungkinkan masyarakat untuk mengekspresikan diri tanpa melalui atau bergabung pada partai politik. (4) Memastikan aturan pemerintah sah dan lebih cenderung mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah.

## 2. Representative (perwakilan)

Bentuk lain dari demokrasi adalah bentuk yang disebut perwakilan. Demokrasi ini memilih pejabat pemerintahan oleh rakyat melalui perwakilan memilih atau membuat pilihan pada siapa yang akan mencalonkan diri untuk jabatan di partai politik tersebut. Beberapa demokrasi perwakilan memilih bentuk demokrasi langsung dalam hal referendum. Amerika Serikat dalam masa sekarang menggunakan demokrasi perwakilan. Pemerintah bekerja dengan mengirimkan wakil-wakil ke dalam senat yang kemudian mewakilkan gagasan-gagasan dari rakyat.

Demokrasi perwakilan adalah bentuk demokrasi yang terbatas dan tidak langsung. Hal ini dibatasi dalam partisipasi politik dan jarang pemilihan suara dilakukan secara singkat. Merupakan demokrasi yang tidak langsung karena masyarakat tidak menjalankan kekuasaan itu sendiri tetapi hanya memilih siapa yang akan memerintah atas namanya atau melalui perwakilannya. Seperti bentuk aturan yang hanya mengandalkan efektifitas antara pemerintah dan yang di perintah dan terkadang dapat mengekspresikan gagasannya melalui pemilu. Kekuatan demokrasi perwakilan meliputi, (1) menawarkan bentuk praktis dari demokrasi dalam partisipasi rakyat secara langsung hanya dapat dicapai dalam komunitas kecil. (2) meringankan warga biasa dari beban pengambilan keputusan politik yang memungkinkan lancarnya politik untuk politikus yang hanya mengenal politik itu sendiri. (3) memastikan pemerintah serta pengalaman dan pengetahuan yang tepat. (4) menjaga stabilitas politik negara dengan menjauhkan warga biasa dari permainan politik negara.

Dalam sistem pemilu perwakilan yang dipakai oleh pemerintah Amerika Serikat dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:



Gambar 1

Proses terdaftar presiden untuk warga Negara di negara negara bagian dengan pemilihan pendahuluan calon presiden.

Keterangan gambar :

Tahap 1 : pemilih terdaftar di bagi menurut pendaftar partai.

Tahap 2 : pemilih republik memilih satu dari calon presiden partai publik dan pemilih demokrat memilih satu dari calon demokrat. Para pemilih sebetulnya memilih wakil dari konvensi partai yang berjanji untuk mendukung pemenang pemilihan pendahuluan sebagai calon presiden dari partai di sidang partai nasional.

Tahap 3 : wakil - wakil konvensi nasional partai publik dan partai demokrat dengan suara terbanyak menerima program partai dan menunjukkan calon partai untuk presiden dan wakil presiden. calon untuk kedudukan presiden ditujukan lebih dahulu, dan pemilihan wakil presiden biasanya disahkan oleh sidang.

Tahap 4 : dalam pemilihan umum ( November) pemilih yang memenuhi syarat memberikan satu suara untuk presiden dan wakil presiden. Tetapi suara yang formal memilih orang-orang yang berhak memilih presiden sama banyaknya dengan senator Amerika Serikat dan wakilnya. Calon yang mendapatkan suara terbanyak di neraga bagian memenangkan semua suara untuk badan pemilih presiden di negara itu.

Tahap 5 : ada 538 suara di pemilih presiden yang terdiri dari 100 kursi senat, 435 majelis tambah 3 suara badan pemilih untuk distrik kolumbia.

Tahap 6 : presiden dan wakil presiden secara formal dipilih oleh mayoritas suara dalam badan pemilihan presiden (270) jika tidak ada calon yang menerima suara mayoritas dari badan pemilihan presiden, majelis perwakilan memilih seorang presiden dari 3 calon yang mendapatkan suara terbanyak, wakil-wakil dari setiap negara memilih sebagai suatu kesatuan, dan setiap negara bagian mempunyai satu suara.

Gambar di atas mampu memberikan gambaran mengenai bagaimana sistem pemilu di Amerika Serikat dalam peranannya terhadap demokrasi. Dapat dilihat bahwa konvensi-konvensional partai berperan besar terhadap rakyat dari pemerintah untuk rakyat.

### **C. Penerapan demokrasi di Indonesia**

Dalam dewasa ini, dapat dikatakan bahwa Indonesia sangat berpotensi menjadi kiblat acuan demokrasi di kawasan Asia, berkat keberhasilan mengembangkan dan melaksanakan sistem demokrasi. Menurut ketua Asosiasi konsultan politik Asia Pasifik (APAPC), keberhasilan Indonesia dalam bidang demokrasi mampu menjadi contoh bagi negara-negara di kawasan Asia yang sampai sekarang ada beberapa di antaranya masih di perintah oleh "tangan besi". Indonesia juga menjadi contoh, bahwa pembangunan sistem demokrasi dapat berjalan seiring dengan upaya pembangunan ekonomi. Keberhasilan Indonesia dalam berdemokrasi yang tidak disadari itu, membuat pihak luar termasuk Asosiasi Internasional konsultan politik (IAPC), membuka mata bangsa Indonesia, bahwa keberhasilan tersebut merupakan sebuah prestasi yang luar biasa. Prestasi tersebut menjadikan Indonesia berpotensi mengantar datangnya era baru di Asia yang demokratis dan makmur.

Dalam bidang demokrasi, presiden Indonesia menerima anugerah medali demokrasi. Menurutnya, Indonesia merupakan jawaban terhadap skeptisme perjalanan demokrasi di negeri ini. Ia memberikan beberapa contoh nad sketips yang ditunjukkan kepada Indonesia pertama demokrasi akan membawa situasi kacau dan perpecahan. Demokrasi di Indonesia hanyalah perubahan rezim, demokrasi akan memicu ekstrimisme dan radikalisme politik Indonesia.

Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa demokrasi Indonesia menunjukkan Islam dan modernisme dapat berjalan beriringan. Terlepas dari guncangan hebat akibat bergantian 4 kali presiden selama periode 1998-2002 sekarang masih berjalan demokrasi Indonesia dengan presiden Indonesia yang ke-6 yang sedang berjalan dan akan mengikuti pemilu

untuk presiden yang ke 7. demokrasi Indonesia telah mampu menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selanjutnya Indonesia telah berhasil menjadisebuah negara demokrasi terbesardi dunia dan melaksanakan pemilu terdahulu yang kompleks dengan sangat sukses. Kita nantikan keberhasilan pemilu tahun 2019 ini dengan antisipasi dan harapan besar untuk suksesnya kembali untuk kesekian kali nya di Indoneisa.

Pada awalnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dinilai oleh banyak pihak tidak akan sukses atau tidak akan berhasil namun, kenyataannya demokrasi di Indonesiasaat ini telah mencapai usia 17 tahun dan senantiasa akan terus berkembang. Sebagian orang pernah berpendapat bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan mampu berlangsung lamayang diakibatkan oleh kondisi masyarakatnya yang belum sia, disisi lain secara geografis negara Indonesia terlalu besar . dan memiliki persoalan yang kompleks. keraguan keraguan tersebut menyerupai kekhawatiran yang dapat membuat Indonesia “chaos” dan dapat menakibatkan perpecahan. Sementara itu mantan perdana menteri malaysia anwar Ibrahim berpendapat : bahwa demokrasi di Indonesia telah berjalan dengan baik. Hal itu telah menjadi Indonesia sebagai negara dengan populasi 4 besar dunia yang berhasil melaksanakan demokrasi.dan juga membuat Indonesia sebagai negara berpenduduk islam terbesar di dunia yang telah berhasil menerapkan demokrasi. Ia percaya bahwa kedepannya perkembangan ekonomi akan meyakinkan sehinga demokrasi bisa disandingkan dengan kesuksesan pembangunan. Hal tersebut tentunya bisa terjadi apa bila demokrasi dapat mencegah korupsi dan penumpukkan kekayaan hanya pada elit tertentu. Demokrasi, menurut Anwar Ibrahim adalah pemberian kebebasan kepada warga negara, sedangkan kegagalan atau keberhsilan ekonomi menyangkut sistem yang diterapkan.

#### **D. Peranan Demokrasi AS dalam Perkembangan Demokrasi Indonesia**

Hampir semua negara di seluruh dunia saat ini menyatakan bahaw sistem pemerintahan yang mereka anut adalah sistem demokratis. Apa yang disebut sebagai yang demokratis ? ada beberapa model atau prototipe demokrasi yang di tiru oleh banyakl negara yang baru merdeka ( Afrika,Asia, Amerika Latin, dan eropa timur), di antaranya demokrasi model Inggris, Prancis atau Amerika Serikat(AS).

Sejauh ini, model yang paling banyak ditiru adalah demokrasi model AS. Sebagai negara demokrasi, AS merdeka belakangan dibandingkan Inggris dan Prancis. Demokrasi AS dipromulgasikan ( promulgated)pada abad ke 18. kemerdekaan AS bermula dengan dikumangdangkannya Deklarasi Kemerdekaan ( Declaration of Independence) dari Inggris yang ditulis oleh Thomas Jefferson yang baru berumur 34 tahun pada saat itu. Deklarasi itu disetujui oleh pemerintah persekutuan 13 negara koloni yang disebut dengan continental congress pada tagl 4 juli 1776. dengan pernyataan ini continental congress meutuskan untuk merseka dari Inggris, dalam dokumen yang bersejarah itu tercantum konsep generik demokrasi dan hak asasi manusia.

Jefferson, seorang politikus dan terpelajar dari Virginia, sangat terpujau dengan filsafat politik John Locke yang menyatakan bahwa pemerintah itu adalah satu kontrak antara yang memimpin (*ruler*) dan yang dipimpin (*The governed*). Yang dipimpin akan taat kepada si pemimpin selama hak asasi (*basic rights*) yang mencakup hak hidup, hak kemerdekaan, dan hak berharta (*life, liberty and property rights*) dilindungi oleh sang pemimpin. Oleh Jefferson, hak harta diganti menjadi *the pursuit of happiness* atau upaya mengejar kesejahteraan rakyat. Thomas Jefferson menyesuaikan konsep ini terkait kondisi AS pada waktu itu yang dipenuhi imigran, pekerja - pekerja yang terpaksa meninggalkan negara mereka dari kejayaan pemerintah feodal dan diktator kerajaan yang sangat dominan.

Inilah titik pokok sejarah demokrasi AS yang kemudian diperbaiki dalam konstitusi AS (*Philadelphia Constitutional Convention*) yang diselenggarakan pada Mei 1787. Perlu dicatat, sebelumnya persekutuan 13 negara koloni asli (*original states*) ini bergabung sebagai perserikatan negara (*The United State of America*) dan diatur dalam konstitusi yang dikenal sebagai *The Articles of Confederation 1777*. Konsep pemerintahan ini sangat tidak memadai, terutama dalam soal hak asasi rakyat. Hak pemerintahan di dalam konstitusi ini masih dipegang oleh tiap negara koloni.

Amerika selama ini dikenal dunia sebagai negara sentralnya demokrasi, bahkan sering disebut negara paling hebat demokrasinya. Demokrasi menjadi satu dari dua asas ideologi AS. Dasar lain adalah ekonomi liberal yang tercermin dalam bentuk kapitalisme. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, baik secara demokrasi langsung maupun demokrasi perwakilan. Arti umum dari demokrasi adalah rakyat memilih kekuasaan, hak, dan turut mengambil keputusan melalui otoritas untuk mengawasi pelaksanaannya.

Namun kiprahnya di dunia internasional ternyata tidak tercerminkan jiwa sejati sebagai negara demokrasi. Sehingga banyak dikatakan demokrasi AS memakai standar ganda. Demokrasi yang dipakai adalah demokrasi gaya kapitalis imperialisme. Alasan penting dibalik seluruh kebijakan luar negeri AS yang intervensi adalah untuk mempromosikan demokrasi. Atas nama demokrasi, pemerintah "paman Sam" ini, merasa berhak melakukan intervensi politik ke negara lain yang dipandang dapat mengabaikan nilai-nilai dasar demokrasi itu sendiri. Beberapa contohnya adalah Salvador Allende di Chile, Sandinista di Nikaragua, Soekarno di Indonesia, Jean Beltrand Aristide di Haiti dan Saddam Hussein di Irak yang merupakan dampak dari kebijakan promosi demokrasi.

Tapi, menurut William I Robinson, sosiolog dari Universitas California, Santa Barbara menyatakan bahwa intervensi pemerintah AS bukanlah demokrasi melainkan imperialisme yang bertujuan untuk mengontrol, membatasi, menundukkan meluasnya gerakan demokrasi rakyat, kekuatan sosial atau pun politik yang bermaksud menentang kuasa neoliberal sehingga dapat mengubah tatanan yang sudah matang. Demokrasi AS telah menjadi kendaraan bagi elit untuk mengamankan, meluaskan kepentingannya sembari mengasingkan kepentingan mayoritas rakyat AS. Untuk lebih luas lagi demokrasi adalah

sebuah proses yang senantiasa bertransformasi dan menjadikannya natural. AS selalu mengklaim sebagai penegak demokrasi di dunia. Berbagai perang yang gelar George W. Bush, mantan Presiden AS pasca peristiwa 11 September 2001 adalah dalih untuk memperluas kebebasan dan demokrasi serta memerangi terorisme. Pandangan realistik terhadap masyarakat AS dan kebijakan prinsip baku demokrasi dan hak - hak asasi manusia di AS tidak dijunjung tinggi, bahkan AS dengan slogan demokrasi berupaya meraih keuntungan untuk memenuhi tujuan politik dan ekonominya di seluruh penjuru dunia. Amerika selalu menggunakan istilah demokrasi untuk memperluas dominasi dan agresinya ke negara - negara lain. Kebijakan AS terkait demokrasi tidak konsisten dan dapat dikritisi. Slogan -slogan manipulasi publik seperti penegakan demokrasi yang diklaim para politisi negara ini telah gagal. Kenyataannya adalah demokrasi yang sesungguhnya tidak pernah ada dalam pandang AS. Menurut pengakuan berbagai lembaga dan kelompok politik AS, pelanggaran terhadap demokrasi di negara pengklaim penegak demokrasi ini tidak sedikit.

Mayoritas sekutu AS di dunia membentuk pemerintah tidak berlandaskan demokrasi. Meski sisi - sisi demokrasi tampak jelas diterapkan di negara- negara anti AS, tetapi gedung putih tetap memusuhi negara -negara itudiakibatkan penentangannya terhadap kepentingan -kepentingan AS, bahkan washington menuduh negara- negara penentangannya telah melanggar demokrasi.

Untuk merealisasikan demokrasi yang sesuai dengan pandangan AS washington menempuh beberapa jalan, di antaranya, secara langsung memilih opsi militer seperti invasi ke Irak dan Afganistan atau melalui perantara rezim zionis Israelseperti agresi rezim ini ke lebanon, atau bahkan menggunakan berbagai kelompok ekstrim kelompok salafi yang kita saksikan di suriah saat itu.

Demokrasi versi AS telah berulang kali melanggar prinsip dan manifestasi demokrasi yang diklaim di negara Indonesia. Pelanggaran itu tampak di berbagai sisi seperti tidak adanya partisipasi luas dalam politik, pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat, kontrol media halus, proses pemilu yang tidak efektif dan penuh kecurangan, diskriminasi etnis dan ras, sikap brutal polisi dan militer, serta lain sebagainya.

### **E. Kesimpulan**

AS merupakan negara yang paling kuasa, paling kaya, paling besar serta paling mengetahui tentang demokrasi dan selalu menjadi kerangka acuan dalam studi mengenai bentuk demokrasi, hukum dan pemerintah, ideologi politik proses politik dan kebijaksanaan umum, ciri -ciri demokrasi yang stabil dan akibat politik dari perpecahan budaya bahwa pemerintah AS merupakan suatu bentuk pemerintah yang presidensial yang berdasarkan pada asas pemisahan kekuasaan dan "*check and balance*". Federasi merupakan struktur negara AS yang mempunyai aturan hukum atau sekurang - kurangnya dalam prinsip, menyisihkan kepentingan pribadi yang picik dari individu dan kelompok melalui proses politik yang ditandai oleh persaingan partai politik dan kelompok kepentingan.



Didalam pemerintahan AS, pendapat umum merupakan faktor penting walaupun tidak selalu yang menentukan dalam pembuatan kebijaksanaan umum. Didalam pertumbuhan kekuasaan, pengaturan dan aparat administratif pemerintah AS mencerminkan peralihan masyarakat dari gaya hidup kota kecil dan pertanian ke gaya hidup kota besar, pabrik, perkantoran serta lilin dan lampu, minyak beralih ke lampu dan pijar dan lampu neon, dan pemerintah yang berubah menurut keadaan.

Pemilihan dan pembuatan kebijakan didasarkan pada asas pilih yang universal dan pemerintahan perwakilan. Pemilihan umum diatur melalui “*single member distric*” sistem pemilihan pluralistik sederhana. Hal ini mengakibatkan sistem partai politik menjadi dua sistem partai yang dikarenakan akibat yang tak terhindarkan dari sistem pemilihan umum. Badan legislatif nasional konvensi mempunyai dua kamar dan kedua kamar ini mempunyai wewenang sama dalam pengesahan undang - undang yang keanekaragaman budaya di AS tampak dalam agama dan ras yang mempunyai dampak terhadap politik AS.

Bagaimana pun sejauh ini Indonesia lebih memperhatikan pada lembaga- lembaga formal dan struktur pemerintahan AS dari pada politiknya. Dengan demikian penyelidikan lebih kepada fisiologi sistem politik AS untuk menyelidiki kekuatan - kekuatan utamanya. Dan akan menemukan bahwa jantung keseluruhan sistem adalah partai - partai yang ada di AS.

Di Indonesia dapat bercermin kepada pemerintah AS bahwa yang menguatkan sistem “*Check and balance*” kepada pemerintahannya oleh rakyat sehingga menjamin agar tiap cabang pemerintahan dapat melindungi dirinya dari infasi terhadap kemenangannya oleh badan - badan lain, tiap badan di beri peran oleh badan lain yang sesungguhnya merupakan akibat wajar bukan suatu kontrak dari asas pemisah kekuasaan. Begitu

Pun kongres nasional sebagai contoh, untuk bekerjanya badan eksekutif dan menentukan yuridiksi banding Mahkamah Agung, presiden mencalonkan para hakim untuk pengadilan dan memainkan peran legislatif melalui wewenang konstitusionalnya untuk mengusulkan dan memfeto perundang- undangan. Disini wewenang Mahkamah Agung untuk menolak semua orang lebih mencerminkan suatu “pengawasan” secara hati - hati.

## **F. Daftar Pustaka**

- Bhakti, Ikrar Musa , The transition to Democracy in Indonesia, some outstanding problems, Democracy in Indonesia.
- Beetham, David, Parliament and democracy in the tweety first century, a guide to good practice, 2006, interparliament union, Switzerland, ISBN 978-92-9142-366-8.
- Budiarjo, Miriam , dasar dasar ilmu politik Edisi , Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama 2009.
- Fissen, P.H.A, Representative Democracy and information society - a post

- modern perspective , information on policy : the international Journal of government and democracy in the information age, 2002, vol 7 issue 4.
- Huntington , Samuel P., Dkk, kebangkitan peran budaya “ bagaimana nilai - nilai membentuk kemajuan manusia “ Indonesia : LP3ES , 2006.
- Jensen, Robert, The myth of the neutral professional , progressive librarian, winter 2004, issue 24.
- John, E.T. The coming age of direct democracy: California recall and beyond choice current review for academic libraries Feb 2008 vol.45, issues 1.
- Moniruzzaman, M. Deeping Democracy in Indonesia? Direct elections for local leaders(PLKADA), intellectual discourse, 2009, Vol.17, issues 1.
- Rausoh ,J.D., Educated by initiative: the effect of direct democracy on citizen and political organization in the American State, choice: current reviews or academic libraries may 2005, vol 42, issue 9.
- Richard. Dkk, CQ collection : making sense of the representative democracy Jan 2008, Vol9, issue 3.
- Rodee, Carlton Clymer, Dkk, Pengantar Ilmu Politik , Jakarta, : PT. Raja grafindo Persada 2008.
- Titus, A.C., Inisiatif - Centered politics: The new politic of direct democracy , choice current review for academic libraries Sept 2007, Vol.45, issue 1.
- Urofsky, melvin. I., Basic Reading in the US democracy, United States information Agency division for the study of the United State Washington DC 205047. 1994.

www.republika.com

[www.proconsertave.net.cuna](http://www.proconsertave.net.cuna)